



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
UNIT KERJA : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ALEXANDER LIMBONG
2. Jabatan : KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA
3. NHK : 460987

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 3.875.311.600

1. Tanah dan Bangunan Seluas 330 m2/234 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , WARISAN Rp. 711.672.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 442 m2/40 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , WARISAN Rp. 530.774.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 240 m2/80 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , WARISAN Rp. 1.182.640.000
4. Bangunan Seluas 45 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI , HIBAH TANPA AKTA , Rp. 971.676.000
5. Tanah Seluas 492 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HIBAH TANPA AKTA Rp. 478.549.600

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 400.000.000

1. MOBIL, TOYOTA VOXY Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 125.510.000

D. SURAT BERTAHAP Rp. 191.940.810

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 460.250.000

F. HARTA LAINNYA Rp. 49.000.000

Sub Total Rp. 5.102.012.410

III. HUTANG Rp. 1.197.454.691

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 3.904.557.719

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkp.kpk.go.id.



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.